



Eksistensi Kesra Pemko Batam dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Putra Anggiat Marito Pasaribu¹, Firman Kurniawan², Rizky Akbar³

¹²³ Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang

190565201119@student.umrah.ac.id¹, 2190565201111@student.umrah.ac.id²,

190565201122@student.umrah.ac.id³

Kata kunci:	Abstrak
Fasilitas, Pengordinasian Kinerja.	Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kesejahteraan Rakyat (KESRA) kota Batam dalam menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kota Batam, dari penulisan ini juga menjelaskan hal apa saja yang di lakukan Kesra Batam dalam menunjang suksesnya menjaga kerukunan yang ada di kota batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan pengamatan lapangan (observasi) dengan bantuan instrumen pengumpulan data. Kemudian didapat hasil dari penelitian ini yaitu :1) Terciptanya kerukunan umat beragama yang ada dikota batam, terjadi karena adanya kerja sama semua pihak baik itu masyarakat, Pemerintah Kota Batam dan Semua Tokoh Agama. 2) Adanya pengordinasian tugas dari Instansi Pemkot Batam khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) bekerja sama dengan FKUB selaku Ormas yang bergerak di bidang keagamaan. 3) Fasilitas yang disiapkan Pemkot Batam dalam menyukseskan kegiatan agama yang ada di Kota Batam.

Pendahuluan

Kedudukan: Pasal 3 Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Tugas: Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Fungsi: Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yaitu: Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya (*Batam 2019*). Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu bagian dari 12 bagian yang berada dibawah naungan sekretariat daerah yang ada di Kota Batam. Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki beberapa sub.bagian diantaranya : Sub.Bagian Bina Mental dan Spiritual. Bagian ini memiliki tugas yakni; Memberikan insentif kepada tokoh agama yang ada Di Kota Batam diantaranya; BMGQ(Badan Musyawarah Guru Tpq), IPIM(Ikatan Persaudaraa Imam Masjid/Mushola), PMB(Persatuan Mubalig Batam), IPMB(Ikatan Pendeta Menetap Batam) , Melakukan kegiatan ujian munaqosah kepada santri

TPQ yang ada Di Kota Batam dan dibantu oleh BMGQ Kota Batam dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dilakukan dilaksanakan disetiap tahun nya.

Adapun kegiatan Tahun 2022 yang telah dilaksanakan : Pada Bulan Januari 2022 telah dilaksanakan kegiatan rutin tahunan di awal tahun yakni verifikasi calon penerima insentif tahun 2022 baik itu dari Guru TPQ, Imam, Mubaligh, Maupun Pendeta kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari di 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Selain melakukan verifikasi Bagian Kesra juga melakukan penginputan data baru bagi para calon penerima insentif baru di tahun 2022 baik itu dari Guru TPQ, Imam, Mubaligh, Maupun Pendeta yang diusulkan oleh masing-masing koordinator kecamatan di setiap organisasi. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat antusias dari masyarakat khususnya bagi para calon penerima insentif. (*Kegiatan Bulan Januari 2022 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam , 2018*).

Berdasarkan pendahuluan diatas, peneliti ingin melihat peran KESRA(Kesejahteraan Rakyat) Kota Batam dari pelaksanaannya yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan agama yang ada di Kota Batam , baik itu pelaksanaannya dari segi pembangunan rumah ibadah dan toleransi yang ada kehidupan bermasyarakat.

Metode

Penelitian dengan judul Eksistensi kesejahteraan rakyat dalam menjaga kerukunan umat beragama ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan pengamatan lapangan (observasi) dengan bantuan instrumen pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yaitu Kabag Kesra Bapak Mahlil, SKM.,M.Si mengenai kinerja KESRA Kota Batam dalam menjaga kerukunan umat beragama yang ada di kota Batam. Penelitian ini di lakukan di gedung Pemko Batam, Khususnya Sekretariat Daerah Kota Batam, Bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA). Desain penelitian ini terkategori sebagai penelitian fenomenologi, yaitu penelitian dengan analisis kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya berlandaskan pada usaha mempelajari dan melakukan ciri-ciri hakiki fenomena-fenomena sebagaimana fenomena itu sendiri. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dalam sebuah organisasi.(Permana Wahyu & Hakim, 2022)

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada beberapa indikator utama mengenai sukses nya KESRA Kota Batam dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Batam, yaitu :

Kualitas Kinerja

Informasi dari Pak Mahlil, SKM.,M.Si selaku Kabag Kesra kota Batam, memberikan penjelasan terkait kinerja yang beliau berikan kepada bawahannya mengenai pengoordinasian pembagian tugas yang diberikan seperti pembuatan surat mengenai izin pembangunan rumah ibadah. Disini dilakukan secara bertahap dan rinci dalam melihat legalitas lahan yang akan di bangun rumah ibadah, beliau mengatakan “ Sebelum rumah ibadah ini di bangun kami melihat dulu beberapa syarat yang sudah terpenuhi, seperti

legalitas lahan, surat izin dari KEMENAG, dan saya beserta jajaran saya turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi di lapangan, apakah tidak ada konflik di lapangan saat membangun rumah ibadah tersebut ujarnya”, disini lain juga harus ada 90 KTP warga setempat sebagai bukti setujunya masyarakat untuk pembangunan rumah ibadah ini, tidak ada yang di persulit dalam membangun rumah ibadah selama ini, semua sama harus mengikuti prosedur yang sama supaya tidak terjadi konflik di lapangan. Hal ini yang menjadi kunci utama kerukunan umat beragama, baik dalam pembangunan dan pengajuan proposal keuangan, tidak ada yang dibedakan dari segi agama manapun, kembali lagi semua harus mengikuti prosedur yang sama. Di KESRA ini semua agama turut serta dalam kegiatan keagamaan, baik itu Ustadz, Pendeta dan tokoh agama lain nya yang ingin mengajukan keluhan apa pun itu, baik pendanaan atau pun pemakaian gedung PEMKO Batam dalam semua kegiatan agama.

Fasilitas Kinerja dan Hubungan kerja sama antar Lembaga

Adapun kegiatan KESRA dalam melakukan pembinaan kerjasama antar lembaga keagamaan yaitu :Meyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerjasama antar lembaga keagamaan , Melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan setakersama antar lembaga keagamaan, Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan, kerjasama antar lembaga keagamaan, dan dukungan kegiatan haji, Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan, Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan, Melakukan koordinasi kerjasama sosial kemesyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan, Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan, Menyiapkan bahan, dan melakukan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan, Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian bina mental spritual, Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian bina mental spiritual dan Melaporkan pelaksaian kinerja di lingkungan sub bagian bina mental spiritual serta Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis dari atasa sesuai dengan tugas pokok fungsinya berdasarkan kanperaturan perundang undangan. (*Kegiatan Bulan Januari 2022 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam , 2018*)

Konsep Kerukunan Umat beragama

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara,

saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan (Poerwadarmita 1980:106).

Kata kerukunan (Munawar 2003:3) hanya digunakan atau berlaku hanya dalam kehidupan pergaulan kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada melebur kepada satu totalitas (sinkrtisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu menjadi madzhab dari agama totalitas itu melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kerukunan antar umat beragama (Wahyudin 2009:32) adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. (Makalew, Sambiran, & Waworundeng, 2021, Hal. 5)

Kerja Sama FKUB Dengan KESRA Kota Batam Dalam Merukunan Umat Beragama

Kota Batam sebagai salah satu kota Multietnik dan penduduk yang memiliki agama yang berbeda, menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tantangan Pemkot Batam khususnya bagian KESRA dalam menjaga kerukunan umat beragama dengan menggandeng salah satu ormas yaitu FKUB sebagai pilihan untuk menyelesaikan segala konflik yang ada di kota Batam terutama soal agama.

Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) kota memiliki tugas yang sudah di atur dalam perturan bersama menteri Agama Nomor 09 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2006 pasal 09 ayat 2 bahwa tugas dari FKUB Kabupaten/Kota :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas request pendirian rumah ibadah. (Makalew, Sambiran, & Waworundeng, 2021, Hal. 6)

Keterlibatan FKUB Bersama Pemerintah Kota Batam Khususnya Bagian KESRA adalah salah satu keseriusan Pemerintah dalam menciptakan keamanan, agar terciptanya suasana yang kondusif dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik itu dalam kegiatan keagamaan, pekerjaan, Pendidikan dan berbagai macam kegiatan lainnya. Dengan rukun nya umat beragama yang ada di kota Batam ini memberikan dampak positif juga bagi pembangunan,

baik itu pembangunan SDM dan pembangunan fasilitas public guna mensejahterahkan rakyat.

Program Kesra

Program kesejahteraan rakyat dilaksanakan Kesejahteraan rakyat provinsi kepulauan riau lebih memfokuskan pada bidang keagamaan. Implementasi program dalam bentuk program fisik antara lain;

1. Bantuan sarana prasarana keagamaan (peribadatan) baik dalam bentuk uang maupun barang,
2. Pengadaan dan Penyaluran hewan Qurban,
3. Penyaluran Buku-buku Keagamaan,
4. Bantuan korban bencana alam.

Program yang berbentuk non-fisik seperti;

1. Pertama, Rapat Koordinasi Bidang Kesra,
2. Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh,
3. Wisata Rohani (Religi untuk Imam/Pendeta),
4. Kegiatan LASQI,
5. Kegiatan PESPARAWI,
6. Lomba STQ/MTQ tingkat Provinsi dan Nasional,
7. Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan,
8. Pelatihan Dewan Hakim,
9. Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama (Bukber). ((KESEJAHTERAAN RAKYAT Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi & Halil Hi Ibrahim, n.d.)

Sedangkan faktor-faktor mempengaruhi Pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat

1. Pertama, faktor keuangan/anggaran,
2. Kedua, faktor hubungan koordinasi antar instansi baik level provinsi maupun kabupaten/kota se provinsi kepulauan riau.

Faktor-Faktor Mempengaruhi Implementasi Program Di Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam

Untuk seluruh masyarakat atau rakyat yang berada di wilayah kepulauan riau keberhasilannya di tentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup struktur penduduk, maupun faktor-faktor yang ditumbuhkan intervensi dan inovasi pembangunan. Selanjutnya program kesejahteraan sosial bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusakan (konflik etnis/suku/agama), pelaksanaan otonomi daerah, masalah perbatasan dan disintegrasi. Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat untuk membangun kepedulian sosial, kesadaran nilai agama, kebudayaan dan adat-istiadat haruslah ditunjukkan untuk menjawab isu-isu strategi masalah sosial budaya dan keagamaan, seperti :

1. Menurunnya kesadaran spritual keberagaman,
2. Menurunnya jati diri masyarakat akibat berkembangnya budaya egosentris megapolitan,

3. Belum optimalnya penanggulangan masalah-masalah sosial,
4. Belum meratanya pemenuhan kebutuhan hak dasar atas pangan, kesehatan dan pendidikan

Serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Selain itu juga, pemenuhan hak dasar penduduk dimaksud juga dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah yaitu untuk percepat pembangunan daerah luar wilayah kepulauan riau Dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang memiliki keanekaragaman seperti; perbedaan geografi, budaya, sosial, agama dan ekonomi, sehingga apabila tidak di kelola dan diatur keterwakilannya secara proporsional, sinergis dan emansipatoris dapat menjadi kendala di kemudian hari dalam mengimplementasikan program kegiatan. Oleh karena itu, dalam kemajuan kebudayaan yang semakin meningkat intensitas dan ekstensitasnya karena proses globalisasi, maka penanganan solusi masalah kesejahteraan rakyat bagi seluruh lapisan masyarakat haruslah berbasis kepada ilmu pengetahuan dan pembangunan teknologi. (Ibrahim, Suhu, & Nurhasna, 2020, Hal. 48)

Untuk itu, pemahaman pengetahuan dan kemampuan untuk mengaplikasikan dalam urusan kehidupan sehari-hari secara tepat dan benar melalui berbagai orientasi pembinaan, pengembangan dan pelatihan serta mengoptimalkan pranata sosial dan keagamaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi kepentingan masyarakat di masa depan menjadi masyarakat yang tangguh, yang Program-program yang diselenggarakan instansi teknis menunjukkan bahwa di sana-sini masih terdapat kelemahan dan mengkoordinasinya sehingga sering dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih, belum terintegrasi, masing-masing ingin menunjukkan keakuan atau menonjolkan sektornya.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya masalah tersebut antara lain adalah

1. Belum adanya kesadaran bahwa hasil keseluruhan program-program pembangunan masyarakat mempunyai ketergantungan,
2. Keterkaitan dengan hasil-hasil pembangunan lainnya,
3. Masih adanya sifat-sifat pejabat dan atau instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ingin menonjolkan sendiri bahwa program yang dijalankan tidak perlu dikoordinasikan dengan instansi lainnya
4. Dalam pelaksanaan program kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sesungguhnya masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ditemui dilapangan, karena dalam pelaksanaan program kegiatan sudah tentu ada faktor-faktor seperti antara lain ; Keuangan/anggaran, setiap pelaksanaan kegiatan terjadi keterlambatan pencairan dan seringkali kekurangan anggaran;

Koordinasi Biro Kesra dengan DPRD Provinsi belum berjalan maksimal. Koordinasi Biro Kesra dengan Bagian Kesra Kabupaten/kota belum maksimal dilakukan dan begitu Kemenag Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan haji, lomba, STQ, MTQ dan Pesparawi yang belum optimal hubungan koordinasi yang dibangun. (Ibrahim, Suhu, & Nurhasna, 2020, Hal. 49) (Ibrahim, Suhu, & Nurhasna, 2020)

Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan KESRA dalam menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kota Batam ada beberapa Indikator keberhasilan yaitu : 1) Kualitas kinerja dari bagian kesejahteraan rakyat kesekretariatan daerah kota batam, Kabag Kesra memberikan penjelasan terkait kinerja yang beliau berikan kepada bawahannya seperti pengoordinasian dan pembagian tugas yang di berikan, seperti surat menyurat mengenai izin pembangunan rumah ibadah yang di lakukan secara bertahap dan rinci dalam melihat legalitas lahan. Surat izin dari KEMENAG juga sangat diperlukan sebelum rumah ibadah tersebut di bangun, selanjutnya perlu adanya peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi di lokasi yang akan di bangun rumah ibadah, apakah sudah memenuhi syarat dan kriteria. 2) Hubungan kerja sama antar lembaga dan masyarakat, di perlukan untuk kolaborasi yang harmonis, antar instansi dan juga masyarakat. dengan adanya hubungan kerja yang baik maka, masalah dapat di minimalisir sekecil mungkin. Hubungan antar lembaga tidak hanya dari instansi namun juga dengan masyarakat. KESRA juga memiliki tanggung jawab sebagai instansi yang Memfasilitasi dan Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama/aliran kepercayaan lainnya yang ada di kota Batam dan ikut menjalin kerjasama antar lembaga keagamaan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam merukunkan umat beragama.

Daftar Pustaka

BATAM, W. (2019). *SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA*. PERATURAN WALIKOTA BATAM .file:///C:/Users/Asus/Downloads/Perwako_Btm_2019-No_54%20(4).pdf

KESEJAHTERAAN RAKYAT Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi, M., & Halil Hi Ibrahim, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DALAM*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4322786>

Permana Wahyu, I., & Hakim, L. (2022). Analisis SWOT Strategi Pelaksanaan Pendidikan Pramuka pada Gugusdepan Syailendra 06.001-06.002 Jakarta Selatan. In *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* (Vol. 2, Issue 3). <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>

Ibrahim, A. H., Suhu, B. L., & Nurhasna. (2020). *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. KAWASA*, 12.

Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *JURNAL GOVERNANCE*, 9.

Sari, M. N. (2015). Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sanggau. *Governance, S1 Ilmu Pemerintahan*, 9.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam. 2018. *Kegiatan Bulan Januari 2022 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam* %. [online] Available at: <<https://bagkesra.batam.go.id/2022/01/31/kegiatan-bulan-januari-2021/>> [Accessed 1 March 2018].